PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

(Studi Kasus Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango)

ARTIKEL

YASIN DJABI
NIM : D01417061

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
GORONTALO
2021

ABSTRAK

Yasin Djabi, Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango), dibawah bimbingan Ramah Alkatiri, SE, M.Si sebagai Ketua, Sri Hantuti Paramata, SE, M.Pd sebagai anggota.

Penanggulangan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi prioritas pemerintaha, khususnya pemerintah desa. Berbagai program penanggulangan kemiskinan masih terus dijalankan oleh pemerintah, karena itu peran pemerintah desa selalu menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dengan mengambil studi kasus Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan informan sebagai narasumber untuk menjawab tujuan penelitian melalui wawancara.
Peran Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamahu telah diimplementasikan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, yaitu pembangunan sarana jambanisasi, pembangunan rumah layak huni serta pemberian bantuan pemberdayaan pada sektor pertanian.
Peran tersebut dapat dilihat dari keempat aspek atau indikator yaitu; aspek orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Aspek perilaku yang muncul dalam interaksi, Aspek kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan Aspek kaitan antara orang dan perilaku yang mampu memberikan kontribusi..

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Kemiskinan

ABSTRACT

Yasin Djabi, The Role of Village Government in Poverty Alleviation (Case Study of Lamahu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency), under the guidance of Friendly Alkatiri, SE, M.Si as Chair, Sri Hantuti Paramata, SE, M.Pd as members.

Poverty reduction is still a priority for the government, especially the village government. Various poverty reduction programs are still being carried out by the government, therefore the role of the village government is always a concern. This study aims to determine the role of village government by taking a case study in Lamahu Village, South Bulango District, Bone Bolango Regency. This study used a qualitative approach by using informants as sources to answer the research objectives through interviews.
The role of the Government in poverty reduction in Lamahu Village has been implemented through various poverty reduction programs, namely the construction of latrines facilities, construction of habitable houses and the provision of empowerment assistance in the agricultural sector.
This role can be seen from four aspects or indicators, namely; aspects of people who take part in social interactions, aspects of behavior that appear in interactions, aspects of people's position in behavior, and aspects of the relationship between people and contributing behaviors.

Keywords: Role, Village Government, Poverty

PENDAHULUAN

latar Belakang

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi oleh hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya dengan tingkat pendapatan domestic brutonya rendah seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia.

Pemerintah sendiri telah melakukan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum menurunkan angka kemiskinan Indonesia, kecuali pada tahun 2006, September 2013, dan Maret 2015. Sumber : Badan Pusat Statistik 2016. Berbagai intervensi program pemerintah sehingga era presiden Joko

Widodo telah banyak dilakukan antara lain ; a) Program Indonesia Pintar (PIP) b) Program Indonesia Sehat (PIS) c) Program Keluarga Harapan (PKH) d) Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan e) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) f) Program Dana Desa serta g) Program Reforma Agraria.

Berbagai program penanggulang-an kemiskinan yang disebutkan di atas, tentunya berlaku hingga ke daerah-daerah termasuk Kabupaten Bone Bolango khususnya. Namun khusus untuk Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut lebih nyata terlihat adalah melalui Aggaran Dana Desa yang terdiri dari a) Bantuan Rumah Layak Huni (Mahyani) b) Pembangunan Jambanisasi c) Pemberian bantuan UMKM, dan d) Bantuan Langsung Tunai. Keempat program penanggu-langan kemiskinan ini adalah benar-benar merupakan peran pemerintah desa yang begitu serius berpihak kepada masyarakat atau keluarga miskin. Sesuai hasil obeservasi yang dilakukan bahwa Desa Lamahu memiliki jumlah KK miskinan cukup besar hingga mencapai 147 KK dari 403 KK yang ada. Tentunya peran pemerintah Desa Lamahu menjadi suatu keniscayaan dalam rangka menekan angka kemiskinan di desa ini.

Permasalahan yang ada di Desa Lamahu yang sangat sulit dilakukan karena beberapa kendala yang ada di masyarakat seperti; pendapatan masyarakat yang rendah, tidak memiliki pendapatan tetap, kurangnya sumber daya menusia yang memadai (produktif), dan banyaknya pengangguran yang menyebabkan faktor kemiskinan yang berlangsung secara terus-menerus. Sehingga semua permasalahan tersebut peran peme-rintah desa sangat diperlukan. Karena pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat miskin tersebut. Selain itu pemerintah desa dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki, adalah merupakan ujung tom-bak pemerintah pusat dan daerah. Sehingga diharapkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada benar-benar mampu mengangkat kehidu-pan masyarakat dengan lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mencoba memecahkan berbagai permasalahan penanggulangan kemis-kinan dengan menetapkan judul penelitian "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan" (Studi Kasus Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango).

Fokus Masalah

Fokus permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada "Bagaimana peran pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kesmiskinan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemis-kinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002) Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan/status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukanya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Selanjutnya menurut Merton dikutip Raho (2007) menyatakan bahwa Peranan berarti tingkah laku yang diharapkan masyarakat yang mempunyai status tertentu.

Dalama konsep Peranan *(role)* menurut Komarudin (1994:768) mengungkap sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karateristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Selanjutnya peran selalu setiap aktivitas pembangunan, yang dimulai dari gagasan/ide,

Gerakan pembangunan ialah usaha yang berwatak kemanusiaan dan lahir dari suatu kesaksian dan komitmen akan harkat dan martabat manusia. Secara normatif pembangunan itu mesti mewujudkan manusiawi dan tampil sebagai manisfestasi serta aktualisasi dari nilai-nilai insaniah yang penuh harkat dan martabat. (Komarudin, 1994; 67)

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan derajat kemanusiaan yang berangkat dari nilai hidup dan kebutuhan yang hendak dicapai oleh manusia.

Dalam mendorong dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat diperlukannya peranan aktif pemerintah dengan diikuti oleh stakeholder lainnya dan masyarakat. Peranan pemerintah lebih diutamakan melalui perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijak-sanaan pembangunan. Dalam pemba-ngunan pemerintah juga mengupayakan untuk mengarahkan masyarakat ikut serta dalam melaksanakan pembangu-nan tersebut. Administrasi negara juga memberikan peran dalam mendu-kung proses pembangunan yakni mendukung proses perubahan, mem-perhatikan keterkaitan dan keter-paduan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. (Nurlela Kataren, 2011:5)

Kehadiran administrasi pemba-ngunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara yaitu paradigma yang berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pemba-ngunan seperti tersebut di atas Kristiadi (1994:21) memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adalah Administrasi Negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga meru-pakan pendukung perencanaan dan implementasinya.

Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemah kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini maka administrasi pembangunan yang berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju. Dasar inilah Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:

1. Penyusunan kebijaksanaan pe-nyempurnaan administrasi negara yang meliputi upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yang diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana - sarana administrasi lainnya. Ini disebut *the development of administration (pembangunan administrasi)* yang kemudian lebih dikenal dengan istilah *"Administrative Reform"(reformasi admnistrasi)*.
2. Perumusan kebijaksanaan - kebijaksanaan dan program - program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebut *the administration of development (Administrasi untuk pembangunan)*. Administrasi untuk pembangunan *(the development of administration)*
3. Pencapaian tujuan - tujuan pemba-ngunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan dan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan - perubahan kearah keadaan yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan.

Peran Pemerintah Desa

Terjadinya transformasi pemerintahan yang dulunya sentralistik menjadi desentralistik menuntut adanya pemberian wewenang (pendelegasian) bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Pemberian otonomi desa ini membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* sehingga penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik.

Good governance menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah desa, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah desa,

masyarakat dan pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang perorangan atau kelompok tertentu.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa mulai terasa dengan pemberian asas-asas pada penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Indrasto (Wahyudi Dahlan,dkk,2012) adalah:

(1) Kepastian hukum; Asas dalam negara hukum yang mengu-tamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Peme-rintahan Desa.
(2) Tertib penyelenggaraan pemerin-tahan; Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengen-dalian penyelenggaraan pemerin-tahan desa.
(3) Tertib kepentingan umum; Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
(4) Keterbukaan; Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan kete-ntuan peraturan perundang-undangan.
(5) Proporsionalitas; Asas yang meng-utamakan hak dan kewajiban penye-lenggaraan pemerintahan desa.
(6) Profesionalitas; Asas yang mengutamakan keahlian yang berlan-daskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Akuntabilitas; Asas yang menentukan bahwa setiap kegia-tan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertang-gungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Efektivitas dan efisiensi; Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapat tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tetap sesuai dengan rencana dan tujuan.(1) Kearifan lokal; Asas yang menengaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. (2) Keberagaman; dan Penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminatif kelompok masyarakat tertentu. (3) Partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Kemiskinan

Kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kebutuhannya (Yusuf Qardhawi, 2005 : 21). Kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keter-belakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi. dan masalah-masalah lain yang bersumber dari ren-dahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk. Kemiskinan merupakan masalah yang amat kompleks dan tidak sederhana penanganannya (Bappenas,2010).

Penyebab-penyebab kemiskinan terus berputar dan menjadi lingkaran setan. Lingkaran setan kemiskinan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi asal Swedia dan penerima hadiah nobel untuk ekonomi, Ragnar Nurkse. Teori ini menjelaskan sebab-sebab kemiskinan di negara-negara sedang berkembang yang umunya baru merdeka dari penjajahan asing. Pada pokoknya teori ini mengatakan bahwa negara-negara sedang berkembang itu miskin dan tetap miskin, karena produktivitasnya rendah. Kerana rendah produktivitasnya, maka penghasilan seseoarang juga rendah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya yang minim (Maimun Sholeh, 2011).

Menurut Qardhawi (2005;34), penyebab kemiskinan lebih disebabkan dengan karena adanya pengangguran. Berikut ini penjelasan mengenai faktor penyebab kemiskinan menurut Qardhowi :

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran. Dalam hal ini, pengangguran terbagi dua, yaitu : Pertama, Pengangguran jabariah adalah suatu pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini, dan diharuskan menerimanya. Kedua, pengangguran khiyariah adalah seseorang yang memilih untuk menganggur, pada dasarnya ialah orang yang mampu untuk bekerja, namun memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain.
2. Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana, ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab berikut : Pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan. Ketiga, kemiskinan ini bukan disebabkan karena pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun, penghasilannya tidak seimbang dengan pengeluarannya (Yusuf Qardhawi : 2005 : 31-33).

Garry Nugraha Winoto (2011) upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan daya beli masyarakat, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui pemerataan pendapatan. Bentuk pemerataan pendapatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendistribusikan pendapatan dari masyarakat golongan mampu kepada yang tidak mampu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, yang dilaksanakan selama bulan Juli-Agustus 2020.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja dilakukan pengumpulan data penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa (Key informant), Ketua BPD, Ketua LPM, dan 2 orang masyarakat.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek secara langsung pada lokasi penelitian.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Fokus pengentasan kemiskinan menjadi mendesak dan yang lebih penting lagi adalah upaya menekan angka kemiskinan tersebut dilakukan secara konkrit, tepat sasaran dan komprehensif. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan di pedesaan diharapkan dapat terwujud secara selaras.

Secara umum kinerja Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan dapat dilihat dari upaya pemberdayaan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan. Adanya Lembaga Pemerintah yakni Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) berda-sarkan hukum Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Pe-nanggulangan Kemiskinan Daerah.

Untuk memastikan tercapainya target penurunan angka kemiskinan tersebut tidak saja diperlukan *political will* dari pemerintah saja, akan tetapi juga dari seluruh komponen masya-rakat. Penanggulangan kemiskinan bukan merupakan proses instant dan mudah, namun harus *sustainable* dan memerlukan pendekatan yang sistematik. Pemerintah khususnya pemerintah Desa Lamahu perlu mempunyai konsistensi kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir ini. Dimana berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut merupakan kolaraborasi antar pemerintaha pusat hingga pemerintahan desa. Namun penelitian ini lebih memfokuskan pada peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan adalah murni kebijakan desa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) Lamahu. Dimana program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Desa Lamahu yang bersumber dari ADD yaitu: 1). Bantuan mahyani, 2). Pembangunan jamba-nisasi, 3). Pemberian bantuan umkm, dan 4). Bantuan langsung tunai bersumber dari Dinas Sosial dalam bentuk .PKH (Program keluarga Hara-pan) BPNT (bantuan pangan non tunai) serta BST(bantuan sosial tunai).

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Lamahu dalam penanggulangan kemiskinan, maka penelitian menggunakan beberapa indikator, sekaligus menjadi pertanyaan dalam melakukan wawancara kepada berbagai informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang permasalahan yang diteliti. Adapun indikator tersebut adalah 1). Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, 2). Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, 3). Kedudukan orang-orang dalam perilaku, 4). Kaitan antara orang dan perilaku. Biddle dan Thomas (Edy Suhardono,2004)

a. Orang-orang yang mengambil ba-gian dalam interaksi sosial dalam menjalankan program penanggu-langan kemiskinan

Dalam menjalankan perannya dalam penanggulangan kemiskinan Pemerintah Desa Lamahu melibatkan berbagai komponen masyarakat, hal ini dengan maksud agar pencapaian saran program benar-benar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peme-rintah desa

dimulai dengan pendataan kembali kk miskinan yang menjadi sasaran bantuan, melaksanakan verify-kasi data, dan mentapkan penerima bantuan.

Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Lamahu:

> "….peran aparat desa selama ini sudah optimal. Terutama untuk merealisasikan program bantuan kepada masyarakat. Kami sebagai pemerintah desa senantiasa melibatkan berbagai pihak baik BPD, LPM, aparat desa serta masyarakat sendiri dalam kaitan dengan pendataan KK miskinan. Hal ini kami lakukan agar tidak ada masyarakat yang terlewati dalam pemberian bantuan. Demikian pula untuk program-program fisik seperti pembauatan jamban di rumah-rumah masyarakat pene-rima bantuan. Serta bantuan-bantuan untuk UMKM."
>
> *(Wawancara 22 Juli 2020)*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa Lamahu dalam menjalankan perannya melibatkan masyarakat dalam menja-lankan program-program penanggu-langan kemiskinan.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Ketua BPD desa Lamahu:

> "…..ia benar, dalam menjalankan program-program bantuan dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pemberian ban-tuan pada keluarga miskin, pemerintah desa tidak bekerja sendiri, keterlibatan masyarakat khususnya kami dari BPD selalu berkolaborasi dengan pemerintah desa, terutama dalam kaitannya dengan pendataan KK miskin".
>
> *(Wawancara 22 Juli 2020)*

Berdasarkan informasi dari empat informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran pemerintah Desa Lamahu dalam penanggulangan kemiskinan ditinjau dari aspek interaksi sosial dengan elemen masyarakat telah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik.

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi aparat desa selama terlibat dalam pelaksanaan pro-gram yang berkaitan dengan pe-nanganan masyarakat miskin

Perilaku yang muncul dalam interaksi yang dimaksud adalah bagaimana seseorang setelah mengambil perannya, maka akan terlihat apa yang dilakukannya. Artinya seseorang harus ada aktivitas dalam kegiatan atau aktivitas yang diikutinya. Yang dimaksud dari pernyataan ini adalah interaksi melalui peran pemerintah desa dalam menjalankan program pemerintah dalam penanganan kemiskinan di desa Sejahtera.

Seperti yang dikemukakan oleh kepala desa sebagai berikut:

> "….Saya memantau aktivitas setiap aparat desa, karena setiap tahapan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilapangan sudah seharusnya pemerintah desa melibatkan berbagai stakeholder yang ada di desa. Dengan demikian akan terjalin intekasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat khususnya dalam rangka penya-luran bantuan-bantuan kepada KK miskin yang ada di desa ini".
>
> *(Wawancara 28 Juli 2020)*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Lamahu sebagai berikut:

> "….Memang benar, apa yang dikatakan oleh kepada desa. Behubung saya juga selalu terlibat dalam setiap tahapan pembahasan tentang bantuan kepada masyarakat, maka saya tau persis keaktifan aparat desa. Mereka begitu memahami bagaimana koordinasi yang akan dilakukan dalam pendataan KK maupun dalam hal penyaluran bantuan. Walaupun dalam beberapa program bantuan KK miskin ada yang disalurkan melalui rekening masyarakat. Dan disini peran aparat desa memfasilitasi masyarakat agar urusannya jadi lancer"
>
> *(Wawancara 28 Juli 2020)*

Lainnya hal dengan pernyataan salah seorang tokoh masyarakat, sebagai berikut:

> ”….kalau saya lihat tentang peran pemerintah desa dalam pengentasan kemiskinan sudah baik dari aspek komunikasi kebawah, maksudnya dengan masyarakat terutama masyarakat atau KK yang menjadi sasaran. Namun yang perlu ditingkatkan adalah konsisten program yang akan dilaksanakan. Misalnya pembuatan jambanisasi, kadang-kala tidak tuntas. Kalaupun tuntas hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Demi-kian pula untuk beberapa program fisik lainnya”.
>
> *(Wawancara 2 Agustus 2020)*

Dari tiga pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek perilaku yang muncul dalam kaitan peran aparat desa, nyata dan dapat diterlihat berbagai keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamahu. Namun masih perlu selalu evaluasi atas pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya untuk program-program fisik.

c. Bagaimana Kedudukan orang-orang dalam perilaku pelaksa-naaan program kemiskinan selama ini?

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat- sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama- sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama.

Artinya bahwa setiap orang yang mengambil peran akan terlihat mampu menyatu dengan orang lain dalam suatu kelompok. Setelah hal ini dikonfirmasi kepada kepala desa tentang kedudukan aparat desa setelah menyatu dengan dengan baik masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat, maka berikut petikan pernyataannya:

> “… Saya lihat aparat desa biasa saja mereka dalam bergabung dengan kelompok atau apalah namanya, mereka tidak merasa sebagai aparat desa yang harus dihargai atau tidak mengakrabkan diri dengan masyarakat lain. Yang sebenarnya mereka dalam melaksana semua program yang berkaiatan dengan kemiskinan aparat desa bekerja apa adanya sesuai tugas yang mereka emban yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelak-sanaan program-program kemis-kinan.”
>
> (Wawancara,2 Agustus 2020)

Demikian pula dengan Ketua LPM, menyatakan:

> “…aparat desa Lamahu yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama ini sangat bagus dan cukup akomodatif, mereka tidak kaku, bisa langsung menyatu dengan kelompok, atau dengan kami sebagai bagian dari organisasi desa yang memperlancar tugas-tugas dan peran desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada masalah pak”
>
> (Wawancara, 4 Agustus 2020)

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran aparat desa ditinjau dari aspek kedudukan dan perilaku perannya, sudah cukup baik. Aparat desa Lamahu mampu menyatu dan membaur dengan masyarakat di desa sebagai pelayanan mereka tanpa memandang status dan kedudukan di masyarakat.

d. Hubungan orang (aparat desa) dalam perilaku masyarakat terkait respon masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan

Hubungan orang dengan perila-ku adalah merupakan salah satu faktor untuk mengeathui peranan yang dilakukan oleh sebuah organisasi sangat terkait dengan komunikasi yang terjadi. Sebagaimana yang dikemu-kakan oleh Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan. Jika konsensus ditandai oleh kesamaan pandangan, maka ada pula kaitan antara perilaku- perilaku yang ditandai oleh tidak adanya persamaan pandangan. Keadaan ini disebut disensus (dissensus).

Artinya bahwa peran aparat desa disaat dalam menjalankan fungsinya terdapat perbedaan pen-dapat atau pandangan, maka aparat desa tidak mempertahankan penda-patnya justru sebaliknya mereka sadar akan tujuan sebagai pelayanan masyarakat dan untuk semua yang dilakukan untuk semata-mata kepen-tingan masyarakat. Hal ini diperjelas memalui wawancara dengan Sekretaris Desa Lamahu yang menyatakan sebagai berikut:

> "….saya juga termasuk tim yang selalu turun ke lapangan mengujungi masyarakat atau KK miskin yang menjadi target program. kami sebagai aparat desa sadar jika dimasyrakata sering ditmukan perbedaan pendapat dalam penyaluran bantuan maupun penetapan lokasi pembangunan fisik untuk kepentingan air bersih misalnya. Jadi memang tidaklah mudah jika berhapan dengan dengan masyarakat. Tapi itulah tantangan yang kami hadapi."
>
> (Wawancara, 4 Agustus 2020)

Sedangkan menurut Ketua BPD, dalam hal ini dikatakan:

> "….saya juga memaklumi peran aparat desa, kadang mereka menjadi narasumber, sehingga informasi yang mereka berika sangat penting bahkan harus direspon. Hanya saja kadang ada saja pendangan masyarakat yang pendapatnya bisa berbeda dengan pandangan aparat desa tersebut. Tapi itu biasa saja. Akhirnya bisa dicari jalan keluarnya ketika terjadi perbedaan pendapat"
>
> (Wawancara, 4 Agustus 2020)

Berdasarkan keempat pernyataan dari informan di atas, maka peran aparat desa ditinjau dari aspek kaitan orang dan perilaku, tidak menimbulkan masalah terutama dalam perbedaan pendapat. Aparat desa dengan peran mereka mampu menyesuaikan dan memecahkan perbe-daan pendapatan dan perma-salahan dilapangan. Sehingga dengan demikian dilihat dari indikator ini peran pemerintah desa melalui hubungan komunikasi aparat desa dengan masyarakat terkait dengan program penanggulangan kemiskinan cukup baik.

Pembahasan

Peran diartikan pada karakte-risasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran *(role perfomance).*

Demikian pula peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan fokus bahasan dalam penelitian ini. Ternyata berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa pemerintah desa di Desa Lamahu cukup baik, dan menjalankan seluruh target program kerja desa dalam rangka penggulangan kemiskinan desa terutama selang beberapa tahun terakhir ini (2016-2019) sudah sangat maksimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang terlihat bahwa seluruh program kemiskinan telah dijalankan oleh pemerintah desa hingga tahun 2019 anggaran yang disalurkan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan mencapai angka Rp. 770.218.316 untuk pembangunan fisik dan program pemberdayaan. Pembangunan fisik yaitu pembangunan rumah layak huni (Mahyani), pembangunan jamban baku KK miskin, dan program pemberdayaan yaitu pemberian pupuk dan bibit kepada petani.

Selanjutnya dilihat dari empat aspek/indikator yang mengukur peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan, terlihat dengan jelas bahwa pemerintah desa Lamahu mampu memainkan perannya, baik sebagai regulator maupun sebagai pelayan kepada masyarakat sesuai dengan arahan *good governance*. Adapun ke empat aspek yaitu; a) aspek orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial b) Aspek perilaku yang muncul dalam interaksi c). Aspek kedudukan orang- orang dalam perilaku, dan d). Aspek kaitan antara orang dan perilaku

Dengan mikian bahwa tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan dengan

mengambil lokus dan studi kasus di desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan telah dijalankan dengan sangat baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Lamahu telah diimplementasikan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, yaitu pembangunan sarana jambanisasi, pembangunan rumah layak huni serta pemberian bantuan pemberdayaan pada sektor pertanian.
b. Peran tersebut dapat dilihat dari keempat aspek atau indikator yaitu; aspek orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Aspek perilaku yang muncul dalam interaksi, Aspek kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan Aspek kaitan antara orang dan perilaku yang mampu memberikan kontribusi.

Saran

Adpun saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan kemiskinan haruslah menjadi tanggungjawab bersama, karena itu pemerintah desa harus terus mendorong berbagai pihak termasuk masyarakat miskin untuk tidak selalu bergantung pada bantuan.
2. Program pengentasan kemiskinan perlu terus dievaluasi, karena permasalahan kemiskinan di Desa Lamahu tak akan selesai jika penyebab kemiskinan tidak pernah di atasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Parwato. 2001. Penanggulangan Kemiskinan Departemen Permukiman dan Pembangunan Sarana. Jakarta : Wilaya.

Blanchard, Kent, 2004, Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit. Batam Centre: Interaksara.

Didin Immoyo, 2017, Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Skripsi

Edi, Suharto, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

Finer, Samual Edward. 2006. Comparative Government. terjemahan. Ghalia Indonesia. Bandung.

Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju.

HAW. Widjaja. 2003. Otonomi Desa. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Hikmat, R. Harry, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Jamaludin, Nasrullah Adon, 2016, Sosiologi Pembangunan, Bandung, CV Pustaka Setia

Kataren, Nurlela. 2011. Administrasi Pembangunan. Medan: Sinuraya

Kristiadi, J.R. 1994. Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia.

Komarudin, 1994, Ensiklopedia Manajemen, Jakarta, Bumi Aksara.

Priyono, Onny dan Pranarka, A.M.W, 1996, Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS).

Poerwadarminta,2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka

Pranadjaja. 2003. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Alumni. Bandung

Qardhawi, Yusuf, 2005, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta:Gema Insani Press

Raho Bernard. 2007, Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pusaka.

Suhardono, Edy. 1994. Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suharto ES. 2003. Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial. Bandung: STKS Press.

Sunaryo, Urip. 2007. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan penyebabnya. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Supriadi, 2017, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan di Kota Palopo. Skripsi

Triana, Lidya. 2006. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia: Analisis data susenas 2004.

Usman, Sunyoto, 2004. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syaukani.et. al. (2009).Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan:

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007